



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RASYID
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 415257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di BULUKUMBA, WARISAN Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di BULUKUMBA, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 5500 m2 di BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 121.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP/ MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 169.000.000

D. SURAT BERTAGIH

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 548.930.040

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.748.930.040

III. HUTANG

Rp. 21.270.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.727.660.040

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.